

UJIAN AKHIR SEMESTER
MATA KULIAH EKONOMI PENDIDIKAN

Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd., Meyta Pritandhari, S.Pd., M.Pd., Fanni Rahmawati, S.Pd., M.Pd

Nama : Dela zulia pratiwi

Npm : 2313031079

Kelas : 2023 C

➤ **Soal 1 – Efisiensi Anggaran Pendidikan**

Kasus :

Pemerintah Kabupaten A mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 30% dari APBD. Sebagian besar dana digunakan untuk pembangunan gedung sekolah baru, sedangkan pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan pengadaan media pembelajaran digital masih sangat terbatas. Setelah lima tahun, angka partisipasi sekolah meningkat, tetapi kualitas hasil belajar siswa tidak mengalami peningkatan signifikan.

- 1) Analisis penggunaan anggaran pendidikan pada kasus tersebut berdasarkan konsep efisiensi internal dan eksternal pendidikan.

Jawaban:

a) Efisiensi Internal

Efisiensi internal menggambarkan kemampuan sistem pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan proses dan hasil pendidikan yang optimal. Indikatornya dapat dilihat dari kualitas pembelajaran, tingkat kelulusan, serta keberhasilan peserta didik selama mengikuti pendidikan. Pada kasus Kabupaten A, alokasi dana pendidikan yang mencapai 30% dari APBD menunjukkan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan. Namun, sebagian besar anggaran digunakan untuk pembangunan dan perbaikan sarana fisik sekolah, sedangkan program yang berhubungan langsung dengan peningkatan mutu pembelajaran, seperti pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan teknologi pendidikan, memperoleh perhatian yang relatif kecil. Kondisi tersebut menunjukkan adanya inefisiensi internal karena besarnya dana yang dikeluarkan belum mampu meningkatkan kualitas proses belajar maupun capaian pendidikan secara maksimal. Keberadaan fasilitas yang memadai

tidak akan memberikan hasil yang optimal apabila tidak didukung oleh tenaga pendidik yang kompeten dan sistem pembelajaran yang berkualitas.

b) Efisiensi Eksternal

Efisiensi eksternal berkaitan dengan tingkat kesesuaian hasil pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pendidikan dapat dikatakan efisien secara eksternal apabila mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial maupun dunia profesional. Dalam kasus ini, peningkatan angka partisipasi sekolah menunjukkan keberhasilan dalam memperluas akses pendidikan. Akan tetapi, peningkatan tersebut tidak diikuti oleh perbaikan kualitas hasil belajar siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi pendidikan yang telah dilakukan belum berhasil menciptakan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Akibatnya, manfaat pendidikan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kurang optimal dan berpotensi menurunkan daya saing daerah di masa mendatang.

2) Jelaskan dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas sumber daya manusia. Berikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif.

Jawaban:

a) Dampak terhadap Kualitas SDM

- Kemampuan dan kompetensi siswa berkembang secara kurang optimal karena kualitas pembelajaran tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
- Guru memiliki keterbatasan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif akibat minimnya pelatihan dan pengembangan profesional.
- Siswa kurang terbiasa memanfaatkan teknologi dalam proses belajar karena terbatasnya media pembelajaran digital.
- Keterampilan yang dimiliki lulusan berpotensi kurang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan zaman.
- Kualitas sumber daya manusia cenderung tidak berkembang secara optimal karena peningkatan jumlah siswa yang bersekolah tidak diiringi dengan peningkatan kualitas pembelajaran.

b) Rekomendasi Kebijakan

Untuk meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran pendidikan, pemerintah Kabupaten A perlu melakukan beberapa langkah strategis.

- Mengalokasikan anggaran secara lebih seimbang antara pembangunan sarana fisik dan peningkatan kualitas pembelajaran.
- Meningkatkan program pelatihan dan pengembangan kompetensi guru secara berkelanjutan.
- Mengembangkan dan memperbarui kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
- Menyediakan media serta teknologi pembelajaran digital yang memadai untuk mendukung proses belajar mengajar.
- Melakukan evaluasi rutin terhadap hasil belajar siswa sebagai dasar perbaikan kebijakan pendidikan.
- Memfokuskan penggunaan anggaran pada program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan dan kualitas lulusan.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan anggaran pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dialokasikan, tetapi juga oleh efektivitas dan ketepatan penggunaannya dalam meningkatkan mutu pendidikan serta menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

➤ **Soal 2 – Ketimpangan Akses Pendidikan**

Kasus :

Sekolah di wilayah perkotaan memiliki laboratorium lengkap, akses internet cepat, dan guru profesional. Sebaliknya, sekolah di daerah pedesaan mengalami kekurangan guru, fasilitas minim, dan keterbatasan teknologi. Akibatnya, hasil ujian siswa di desa jauh lebih rendah dibandingkan siswa di kota.

1) Jelaskan bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut.

Jawaban:

Kasus tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan ini terlihat dari perbedaan akses, kualitas, dan hasil pendidikan yang diterima siswa di kedua wilayah tersebut. Bentuk ketimpangan yang terjadi meliputi:

a) Ketimpangan Fasilitas dan Teknologi

Sekolah di perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap, seperti laboratorium yang memadai dan akses internet yang cepat. Sebaliknya, sekolah di pedesaan masih menghadapi keterbatasan sarana belajar dan akses teknologi. Kondisi ini membuat siswa di desa memiliki kesempatan yang lebih sedikit untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran.

b) Ketimpangan Kualitas dan Ketersediaan Guru

Sekolah perkotaan umumnya memiliki jumlah guru yang cukup dengan kompetensi yang baik. Sementara itu, banyak sekolah di pedesaan mengalami kekurangan tenaga pendidik dan masih terbatas dalam memperoleh pelatihan atau pengembangan kompetensi. Perbedaan ini berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran yang diterima siswa.

c) Ketimpangan Hasil Belajar

Perbedaan fasilitas dan kualitas guru pada akhirnya berdampak pada hasil belajar siswa. Siswa di perkotaan cenderung memperoleh prestasi akademik yang lebih baik dibandingkan siswa di pedesaan. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan nilai ujian dan pencapaian akademik antara kedua wilayah tersebut.

2) Analisis dampak ekonomi jangka panjang dari ketimpangan pendidikan.

Usulkan solusi kebijakan untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Jawaban:

a) Dampak Ekonomi Jangka Panjang

Apabila ketimpangan pendidikan ini terus berlangsung, berbagai dampak ekonomi dapat muncul di masa depan.

- Meningkatnya kesenjangan pendapatan masyarakat

Siswa yang memperoleh pendidikan berkualitas akan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan berpenghasilan tinggi. Sebaliknya, siswa yang memperoleh pendidikan dengan kualitas rendah akan lebih sulit bersaing di dunia kerja sehingga berisiko memperoleh pendapatan yang lebih rendah. Kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.

- Menurunnya kualitas tenaga kerja
Pendidikan yang tidak merata menyebabkan banyak potensi sumber daya manusia tidak berkembang secara maksimal. Akibatnya, kualitas tenaga kerja menjadi kurang kompetitif dan produktivitas kerja dapat menurun. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
- Meningkatnya urbanisasi
Keterbatasan kesempatan pendidikan dan pekerjaan di desa dapat mendorong masyarakat usia produktif untuk berpindah ke kota. Jika terjadi secara terus-menerus, kota akan menghadapi berbagai permasalahan seperti kepadatan penduduk dan pengangguran, sedangkan desa kehilangan tenaga kerja produktif yang dibutuhkan untuk pembangunan daerah.

b) Usulan Solusi Kebijakan

Untuk mengurangi ketimpangan pendidikan, pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang berfokus pada pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah.

- Meningkatkan pemerataan distribusi guru
Pemerintah dapat memberikan insentif berupa tunjangan khusus, fasilitas, atau peluang pengembangan karier bagi guru yang bersedia mengajar di daerah pedesaan dan terpencil. Selain itu, program penempatan dan pemerataan guru perlu diperkuat agar setiap sekolah memiliki tenaga pendidik yang memadai.
- Meningkatkan fasilitas pendidikan di daerah pedesaan
Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk penyediaan laboratorium, perpustakaan, perangkat pembelajaran digital, serta akses internet yang memadai. Dengan demikian, siswa di desa dapat memperoleh kesempatan belajar yang setara dengan siswa di kota.
- Mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi
Penyediaan platform pembelajaran digital yang mudah diakses dapat membantu siswa memperoleh materi pembelajaran yang lebih luas. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mendukung proses belajar mengajar agar lebih menarik dan efektif.

- Meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan
Pelatihan dan pendampingan bagi guru perlu dilakukan secara rutin agar kualitas pembelajaran terus meningkat. Program pelatihan dapat dilaksanakan melalui komunitas guru, lokakarya, maupun pelatihan daring sehingga lebih mudah dijangkau oleh guru di berbagai daerah.

Melalui kebijakan yang berorientasi pada pemerataan fasilitas, kualitas guru, dan pemanfaatan teknologi, kesenjangan pendidikan antara perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

➤ Soal 3 – Pengangguran Terdidik

Kasus:

Jumlah lulusan perguruan tinggi di Kota B meningkat setiap tahun. Namun, banyak lulusan menganggur atau bekerja tidak sesuai bidang studinya. Dunia industri menilai kompetensi lulusan belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- 1) Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital.

Jawaban:

Teori Human Capital yang dikemukakan oleh Theodore Schultz dan Gary Becker menjelaskan bahwa pendidikan merupakan bentuk investasi yang dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, produktivitas, serta peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Namun, kondisi di Kota B menunjukkan bahwa peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi belum diikuti oleh peningkatan penyerapan tenaga kerja, sehingga memunculkan fenomena pengangguran terdidik.

Salah satu penyebab utama adalah adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang diperoleh selama pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Perguruan tinggi cenderung masih berfokus pada penguasaan teori, sementara dunia industri membutuhkan keterampilan yang lebih aplikatif dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta dinamika pasar kerja. Akibatnya, lulusan memiliki kualifikasi akademik yang memadai, tetapi belum memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan.

Selain itu, banyak lulusan hanya menguasai keterampilan umum (*general skills*) dan belum memiliki keterampilan khusus (*specific skills*) yang menjadi tuntutan berbagai bidang pekerjaan. Kondisi ini menimbulkan *skill mismatch*, yaitu ketidaksesuaian

antara kemampuan yang dimiliki lulusan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Faktor lainnya adalah kualitas investasi pendidikan yang belum optimal. Pendidikan sering kali lebih menekankan pencapaian nilai dan perolehan ijazah dibandingkan pengembangan kemampuan praktis, pemecahan masalah, komunikasi, serta keterampilan kerja lainnya. Akibatnya, modal manusia yang terbentuk belum sepenuhnya mampu meningkatkan daya saing lulusan di pasar kerja.

2) Jelaskan hubungan antara pendidikan dan pasar kerja pada kasus tersebut.

Jawaban:

Secara ideal, pendidikan dan pasar kerja memiliki hubungan yang saling mendukung. Lembaga pendidikan berperan dalam menyiapkan tenaga kerja yang kompeten, sedangkan pasar kerja menyediakan ruang bagi lulusan untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya. Namun, pada kasus Kota B, hubungan tersebut belum berjalan secara optimal. Fenomena yang terjadi menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara jumlah lulusan perguruan tinggi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai. Peningkatan jumlah tenaga kerja terdidik tidak diiringi oleh peningkatan permintaan tenaga kerja yang sebanding, sehingga muncul kondisi yang dikenal sebagai *diploma inflation*. Dalam situasi ini, gelar pendidikan tinggi tidak lagi menjadi jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak.

Selain itu, perkembangan dunia usaha dan industri berlangsung sangat cepat seiring kemajuan teknologi dan transformasi ekonomi. Sementara itu, proses penyesuaian kurikulum di perguruan tinggi sering kali berjalan lebih lambat. Akibatnya, lulusan yang dihasilkan memiliki pengetahuan akademik yang baik, tetapi belum sepenuhnya siap menghadapi tuntutan pekerjaan yang terus berkembang.

Kurangnya sinergi antara perguruan tinggi dan dunia industri juga menjadi faktor yang memperlemah keterkaitan antara pendidikan dan pasar kerja. Minimnya keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum maupun pengembangan program pembelajaran menyebabkan kompetensi lulusan kurang sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Rekomendasi untuk meningkatkan relevansi lulusan.

- Memperkuat Kolaborasi antara Perguruan Tinggi dan Industri

Perguruan tinggi perlu membangun kemitraan yang lebih erat dengan dunia usaha dan industri melalui penyusunan kurikulum bersama, penyelenggaraan magang yang terstruktur, serta pelibatan praktisi sebagai pengajar. Langkah ini dapat

membantu memastikan bahwa kompetensi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

- Mengembangkan Kurikulum Berbasis Kompetensi

Pembelajaran perlu diarahkan pada penguasaan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja, tidak hanya pada aspek teoritis. Penerapan *project-based learning* dan *problem-based learning* dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan masalah nyata dan bekerja secara profesional.

- Meningkatkan Layanan Bimbingan dan Literasi Karier

Perguruan tinggi perlu memberikan pendampingan karier sejak awal masa studi agar mahasiswa memahami perkembangan dunia kerja, peluang karier, serta keterampilan yang perlu dipersiapkan untuk meningkatkan daya saing setelah lulus.

- Menumbuhkan Jiwa Kewirausahaan

Pendidikan kewirausahaan perlu diperkuat untuk mendorong lulusan menjadi pencipta lapangan kerja. Melalui pengembangan kreativitas, inovasi, dan kemampuan berbisnis, lulusan tidak hanya bergantung pada peluang kerja formal tetapi juga mampu menciptakan peluang kerja baru.

- Melakukan Evaluasi Kurikulum secara Berkala

Kurikulum harus ditinjau dan diperbarui secara berkelanjutan dengan melibatkan alumni, pengguna lulusan, serta pelaku industri. Evaluasi yang dilakukan secara rutin akan membantu menjaga relevansi pendidikan terhadap perubahan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi.

➤ **Soal 4 – Kenaikan Biaya Pendidikan**

Kasus :

Sebuah universitas swasta menaikkan uang kuliah sebesar 25% untuk meningkatkan fasilitas kampus dan layanan akademik. Kebijakan tersebut mendapat protes dari mahasiswa karena dinilai memberatkan keluarga berpenghasilan rendah.

- 1) Analisis kasus tersebut berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat.

Jawaban:

Dalam perspektif ekonomi, barang publik merupakan barang yang manfaatnya dapat dinikmati oleh banyak orang tanpa mengurangi manfaat bagi pihak lain serta sulit

membatasi siapa yang dapat mengaksesnya. Sebaliknya, barang privat hanya dapat dinikmati oleh individu yang mampu membayar dan aksesnya dapat dibatasi. Pendidikan tinggi pada dasarnya memiliki karakteristik yang berada di antara kedua konsep tersebut.

Dari sisi manfaat sosial, pendidikan memiliki sifat sebagai barang publik karena menghasilkan berbagai dampak positif bagi masyarakat. Individu yang memperoleh pendidikan tinggi tidak hanya meningkatkan kesejahteraan dirinya sendiri, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas ekonomi, kualitas kehidupan sosial, kesadaran berwarga negara, serta penurunan berbagai permasalahan sosial. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat luas tersebut merupakan bentuk eksternalitas positif yang menjadi alasan pentingnya dukungan negara terhadap sektor pendidikan.

Namun, ketika perguruan tinggi swasta menaikkan biaya kuliah secara signifikan, pendidikan cenderung diperlakukan sebagai barang privat. Akses terhadap layanan pendidikan menjadi sangat bergantung pada kemampuan ekonomi individu. Akibatnya, mahasiswa dari kelompok ekonomi menengah ke bawah berisiko kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas meskipun memiliki potensi akademik yang baik.

Kondisi tersebut memunculkan perdebatan mengenai fungsi pendidikan dalam masyarakat. Di satu sisi, perguruan tinggi memerlukan sumber pendanaan untuk menjaga kualitas layanan dan keberlanjutan operasional. Di sisi lain, pendidikan memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesempatan. Oleh karena itu, pendidikan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pembangunan manusia yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

2) Jelaskan dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan.

Jawaban:

Kenaikan biaya pendidikan berpotensi menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dari sisi sosial, peningkatan biaya kuliah dapat memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Kondisi ini menyebabkan kesempatan memperoleh pendidikan tinggi menjadi tidak merata serta menghambat fungsi pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial. Akibatnya, ketimpangan sosial dapat terus berlanjut dari satu

generasi ke generasi berikutnya. Dari sisi ekonomi, tingginya biaya pendidikan dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi sehingga mengurangi jumlah tenaga kerja terdidik yang tersedia di masa depan. Selain itu, keluarga harus menanggung beban pengeluaran yang lebih besar, bahkan sering kali mengorbankan kebutuhan lain untuk membiayai pendidikan. Mahasiswa juga dapat terdorong untuk bekerja lebih banyak demi memenuhi biaya kuliah sehingga fokus belajar berkurang. Dalam jangka panjang, berkurangnya akses terhadap pendidikan tinggi dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan produktivitas yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa.

3) Apakah pemerintah perlu melakukan intervensi? Jelaskan alasannya.

Jawaban:

Pemerintah perlu melakukan intervensi untuk memastikan bahwa akses terhadap pendidikan tinggi tetap terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Intervensi ini penting karena pendidikan memiliki manfaat sosial yang luas dan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme pasar. Dalam perspektif ekonomi, pendidikan merupakan sektor yang rentan mengalami *market failure* (kegagalan pasar), di mana mekanisme pasar tidak selalu mampu menghasilkan distribusi layanan yang adil. Apabila biaya pendidikan sepenuhnya ditentukan oleh kemampuan pasar, masyarakat dengan kondisi ekonomi rendah akan semakin sulit memperoleh akses pendidikan yang layak. Oleh karena itu, peran pemerintah diperlukan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara.

Selain itu, intervensi pemerintah juga didasarkan pada tanggung jawab konstitusional negara dalam menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan kondisi ekonomi. Ketika kenaikan biaya pendidikan berpotensi membatasi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang dapat melindungi hak tersebut. Di samping itu, pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan mampu meningkatkan daya saing bangsa serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dapat melakukan berbagai bentuk intervensi, seperti memperluas program beasiswa berbasis kebutuhan ekonomi,

meningkatkan bantuan pendidikan bagi mahasiswa kurang mampu, mengembangkan skema pinjaman pendidikan dengan persyaratan yang terjangkau, serta memperkuat regulasi terkait kenaikan biaya pendidikan. Pemerintah juga dapat mendorong perguruan tinggi untuk menerapkan sistem subsidi silang guna membantu mahasiswa yang menghadapi keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, intervensi pemerintah tidak dimaksudkan untuk mengurangi otonomi perguruan tinggi, melainkan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pengelolaan pendidikan dan pemenuhan hak masyarakat atas pendidikan yang adil, merata, dan mudah diakses oleh seluruh warga negara.

➤ **Soal 5 – Digitalisasi Pembelajaran**

Kasus :

Pasca pandemi, sekolah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Namun, siswa dari keluarga kurang mampu mengalami kesulitan membeli perangkat dan kuota internet sehingga partisipasi belajar menurun.

- 1) Analisis masalah tersebut menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost.

Jawaban:

Dalam ekonomi pendidikan, biaya pendidikan tidak hanya mencakup uang sekolah atau biaya administrasi, tetapi juga seluruh pengeluaran yang diperlukan untuk menunjang proses belajar. Digitalisasi pembelajaran pascapandemi menambah komponen biaya baru berupa pembelian perangkat digital, seperti ponsel pintar atau laptop, serta biaya akses internet yang harus dipenuhi secara berkelanjutan. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, pengeluaran tersebut menjadi beban tambahan yang cukup besar dan dapat menghambat akses terhadap pembelajaran. Dengan demikian, digitalisasi yang bertujuan memperluas akses pendidikan justru berpotensi menciptakan hambatan baru bagi kelompok masyarakat kurang mampu

Opportunity cost atau biaya kesempatan adalah nilai dari alternatif terbaik yang harus dikorbankan ketika seseorang mengambil suatu keputusan. Dalam konteks digitalisasi pembelajaran, keluarga berpenghasilan rendah sering dihadapkan pada pilihan antara memenuhi kebutuhan pendidikan digital atau kebutuhan pokok lainnya, seperti pangan dan kesehatan. Ketika sumber daya ekonomi terbatas, pengeluaran untuk perangkat dan internet dapat mengurangi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan

dasar. Sebaliknya, jika kebutuhan pendidikan dikorbankan, siswa berisiko kehilangan kesempatan belajar dan mengalami ketertinggalan akademik. Dalam jangka panjang, biaya kesempatan yang ditanggung bukan hanya berupa pengeluaran finansial, tetapi juga hilangnya peluang untuk mengembangkan kompetensi dan meningkatkan kualitas hidup di masa depan.

2) Jelaskan dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan. Berikan solusi kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut.

Jawaban:

Dampak :

- Kesenjangan Prestasi Belajar

Siswa yang memiliki perangkat dan akses internet yang memadai dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih optimal, sedangkan siswa yang aksesnya terbatas mengalami hambatan dalam memperoleh materi dan informasi. Akibatnya, kesenjangan hasil belajar dan kompetensi antar siswa semakin melebar.

- Meningkatnya Risiko Putus Sekolah

Keterbatasan akses teknologi dapat menurunkan motivasi dan partisipasi belajar siswa. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi meningkatkan angka putus sekolah, terutama pada kelompok siswa dari keluarga kurang mampu.

- Pembelajaran Menjadi Kurang Merata

Perbedaan akses teknologi menyebabkan guru kesulitan memberikan pembelajaran yang efektif dan adil bagi seluruh siswa. Selain itu, proses penilaian menjadi kurang optimal karena tidak semua siswa memiliki kesempatan belajar yang sama.

- Terbatasnya Akses terhadap Sumber Belajar

Siswa yang tidak memiliki perangkat atau akses internet yang memadai sulit memanfaatkan berbagai sumber belajar digital yang tersedia. Kondisi ini mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan secara maksimal.

- Kesenjangan Kompetensi Digital

Dalam jangka panjang, kesenjangan digital dapat menciptakan perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa yang terbiasa menggunakan teknologi

dan siswa yang memiliki keterbatasan akses. Hal ini dapat memengaruhi kesiapan mereka dalam menghadapi dunia kerja berbasis teknologi.

Solusi :

- **Pemberian Bantuan Perangkat dan Internet**
Pemerintah perlu menyediakan bantuan perangkat digital dan akses internet bagi siswa dari keluarga kurang mampu agar seluruh peserta didik memiliki kesempatan belajar yang setara.
- **Perluasan Infrastruktur Internet**
Pembangunan jaringan internet di daerah terpencil serta penyediaan fasilitas internet gratis di sekolah dan ruang publik perlu ditingkatkan untuk memperluas akses pembelajaran digital.
- **Penerapan Pembelajaran *Hybrid***
Sekolah perlu mengombinasikan pembelajaran daring dan luring sehingga siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran meskipun memiliki keterbatasan akses teknologi.
- **Kerja Sama dengan Sektor Swasta**
Pemerintah dapat bekerja sama dengan perusahaan teknologi dan operator telekomunikasi untuk menyediakan perangkat serta layanan internet dengan biaya yang lebih terjangkau bagi siswa.
- **Peningkatan Kompetensi Guru**
Guru perlu mendapatkan pelatihan dalam merancang pembelajaran yang adaptif dan inklusif agar proses belajar tetap efektif bagi siswa dengan kondisi akses teknologi yang beragam.